

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa kasus yang salah satunya yaitu : Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mendirikan bangunan permanen yang seharusnya bangunan tersebut dapat dibongkar pasang seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 pada bab V Pasal 8.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang ditunjang oleh yuridis empiris. Dalam kaitannya dengan jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum sosiologis karena beranjak dari adanya kesenjangan asas/norma hukum yang kabur dan kekosongan norma dalam pengaturan penataan pedagang kaki lima di kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan Pedagang Kaki Lima untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima yang bisa berakibat sama-sama rugi.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengaturan dan Pembinaan, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation of Semarang City Number 11 Year 2000 Against Arranging and Fostering of Street Traders In Semarang City conducted by Satuan Polisi Pamong Praja there are some cases which one of them is: Order of street vendors (PKL) who build permanent building that supposed the building can Dismantled pairs as listed in the Regional Regulation of Semarang City No. 11 of 2000 in Chapter V Article 8.

The type of research used in this research is sociological legal research supported by empirical juridical. In relation to the type of research conducted is a sociological legal research because it departs from the existence of the gap in the principle / legal norms are blurred and void norms in the arrangement of street vendors in the city of Semarang.

The results showed that in implementing the Local Regulation of City of Semarang Number 11 Year 2000 on the Arrangement and Fostering of Street Traders in Semarang City, the Pamong Praja Police Unit always use the method of arrangement by always trying to dialogue with Street Traders to find the best solution between the Police Unit Pamong Praja with a Street Trader to reach a mutual agreement. The collective agreement was made in order to avoid rejection at the time of the curbing which could result in clash between the Civil Service Police Unit and the street vendors which could result in both losses.

Keywords : Implementation, Local Regulation, Arrangement and Guidance, Street Traders.